

**PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KEPALA KELUARGA DALAM PENINGKATAN
EKONOMI KELUARGA MELALUI PROGRAM BUNDA PUSPA**

Faqihatin¹, Nur Faizah², Maslakhatul Ainiyah³

Program Studi Teknik Informatika Universitas Qomaruddin¹, Program Studi Hukum
Keluarga Islam Universitas Qomaruddin², Program Studi Bahasa Inggris Universitas
Qomaruddin³

e-mail: faqihatinmuad@gmail.com

ABSTRAK

Pemerintah memiliki peran penting dalam mengatasi persoalan perempuan, khususnya perempuan kepala keluarga yang memikul peran ganda sebagai pengelola rumah tangga dan pencari nafkah. Salah satu upaya strategis dilakukan melalui Program Bunda Puspa, bagian dari rencana pembangunan Kabupaten Gresik 2021–2026. Program ini bertujuan meningkatkan pendapatan keluarga, memperkuat ketahanan psikologis dan sosial melalui kesetaraan gender serta pemenuhan hak anak, dan mendorong kemandirian ekonomi perempuan melalui pelatihan keterampilan. Penelitian ini bertujuan menganalisis strategi pemberdayaan perempuan dalam peningkatan ekonomi keluarga melalui Program Bunda Puspa di Desa Bungah. Dengan pendekatan deskriptif kualitatif, data diperoleh dari observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap lima perempuan kepala keluarga sebagai informan. Hasil penelitian menunjukkan empat temuan utama: (1) partisipasi aktif perempuan dalam program; (2) perlunya kesinambungan pelaksanaan program; (3) pentingnya pemberdayaan berbasis kebutuhan dan penguatan jejaring sosial; dan (4) belum meratanya sosialisasi program di seluruh lapisan masyarakat. Ke depan, diharapkan strategi pemberdayaan ini dapat dijalankan secara berkelanjutan dengan pembinaan intensif, agar perempuan kepala keluarga semakin berdaya dan mandiri secara ekonomi.

Kata Kunci: *Pemberdayaan Perempuan, Ekonomi Keluarga, Program Bunda Puspa*

ABSTRACT

The government plays a vital role in addressing women's issues, particularly for women heads of households who bear dual responsibilities as both caretakers and breadwinners. One strategic effort is the implementation of the Bunda Puspa Program, which is part of the 2021–2026 development plan of Gresik Regency. This program aims to increase household income, strengthen psychological and social resilience through gender equality and child rights fulfillment, and promote women's economic independence through skills training. This study aims to analyze the empowerment strategies for women in improving family economic conditions through the Bunda Puspa Program in Bungah Village. Using a qualitative descriptive approach, data were collected through observations, interviews, and documentation involving five women heads of households as informants. The study revealed four key findings: (1) active participation of women in the program; (2) the need for continuity in program implementation; (3) the importance of needs-based empowerment and strengthening of social networks; and (4) the uneven dissemination of the program across community levels. In the future, it is hoped that this empowerment strategy will be implemented sustainably, accompanied by intensive mentoring, so that women heads of households can become increasingly empowered and economically self-reliant.

Keywords: *Women's Empowerment, Family Economy, Bunda Puspa Program*

PENDAHULUAN

Perempuan kepala keluarga memainkan peran ganda sebagai pengurus rumah tangga dan pencari nafkah, sehingga kerap menghadapi beban ekonomi dan sosial yang kompleks (Faizah, 2018). Di Kabupaten Gresik, Program Bunda Puspita dirancang untuk memperkuat ketahanan keluarga melalui pelatihan keterampilan, peningkatan pendapatan, dan pemenuhan hak-hak anak. Meski demikian, pelaksanaan program memerlukan evaluasi mendalam untuk memahami efektivitas strategi pemberdayaannya. Secara kuantitas jumlah penduduk perempuan Indonesia jauh lebih banyak daripada laki-laki yang mayoritas berada di perdesaan, tertinggal dan memiliki pendidikan yang rendah (Badan Pusat Statistik, 2024). Namun pada kenyataannya perempuan menjadi beban keluarga apabila tidak dimaksimalkan peran dan fungsinya di segala sektor pembangunan. Sebaliknya, sumber daya perempuan yang besar manfaatnya jika perempuan diberi peran apalagi berdaya guna melalui pemberdayaan. Berbagai langkah dan strategi yang dapat dilakukan untuk menciptakan perempuan mandiri demi mencapai kesejahteraan keluarga hanya saja masih terdapat kurangnya perhatian dan intensitas serta kesinambungan program pemberdayaan perempuan merupakan salah satu penyebab belum terciptanya kesetaraan (Marwanti & Astuti, 2012). Menurut Santi (2004), pemberdayaan perempuan adalah proses di mana wanita berupaya memperoleh akses dan kendali atas berbagai sumber daya, baik itu ekonomi, politik, sosial, maupun budaya. Tujuan utamanya adalah agar mereka mampu mandiri, membangun kepercayaan diri, serta berperan aktif dalam memecahkan isu-isu pembangunan dan mengembangkan potensi diri mereka sendiri.

Dalam struktur rumah tangga, suami mempunyai tugas dan kewajiban sebagai pencari nafkah, Sebagaimana yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 79 Ayat (1) yang menyatakan bahwa, “Suami merupakan kepala keluarga, sedangkan istri merupakan ibu rumah tangga.” Dan ini juga dipertegas di dalam Undang- Undang Perkawinan (UUP) Nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikahan Pasal 31 Ayat (3) menyebutkan bahwa di Indonesia suami memiliki kedudukan penting sebagai kepala keluarga dan pemimpin. Sebagai kepala keluarga dan pemimpin, suami memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi dalam keluarga tersebut (Faizah, 2023). Meskipun dalam hukum Islam suami secara tradisional dianggap sebagai kepala keluarga, perempuan juga memiliki potensi untuk berperan aktif dalam posisi tersebut. Seiring dengan perubahan dinamika sosial, peran dan tanggung jawab laki-laki serta perempuan mengalami reinterpretasi, yang pada akhirnya memengaruhi pembagian tugas dalam rumah tangga (Faizah, 2018). Fenomena ini menyebabkan pergeseran peran suami dari satu-satunya pencari nafkah dan tulang punggung keluarga, menjadi peran yang juga dapat diemban oleh perempuan dalam menopang kebutuhan ekonomi keluarga.

Strategi pemberdayaan yang diharapkan agar mampu menciptakan kemandirian perempuan kepala keluarga ini telah diupayakan oleh Dinas Keluarga Berencana Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Gresik dengan melakukan Inovasi Program Pembelajaran terhadap perempuan miskin dan perempuan kepala keluarga ini yang kemudian dikenal dengan BUNDA PUSPITA yang melalui program ini diharapkan perempuan sebagai kepala keluarga ini mampu mandiri secara pribadi agar bisa menyejahterakan keluarganya. Dengan demikian, Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik sebagai kepanjangan tangan pemerintah pusat, dalam melaksanakan kebijakan maka telah melakukan strategi pemberdayaan perempuan dengan melakukan strategi pembelajaran terhadap 30 KPM Per kecamatan diambil 1 Desa yang mana pada tahun ini dilakukan pembelajaran terhadap 240 perempuan se Kabupaten Gresik dengan menerapkan pembelajaran selama 6 Bulan dalam satu Tahun dengan memberikan peningkatan kapasitas sasaran dengan beberapa materi Konsep Gender, berbagi peran, kewirausahaan dan pengembangan usaha, program ini telah dilakukan sejak tahun 2023 hingga 2024 ini memberikan dampak positif bagi

penerima manfaat program Bunda Puspa ini khususnya di Desa Bungah Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik dan besar harapan mereka program ini bisa berjalan berkelanjutan serta bisa diimplementasikan ke desa yang lain.

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan perempuan efektif bila berbasis kebutuhan spesifik peserta dan didukung jejaring sosial yang kuat. Selain itu, kesinambungan pendampingan dan akses informasi yang merata juga menjadi faktor kritis kesuksesan program pemberdayaan (Sulastri & Ningsih, 2020). Berbagai studi menegaskan bahwa pemberdayaan perempuan lebih efektif bila dirancang berdasarkan kebutuhan spesifik peserta dan didukung oleh jaringan sosial yang kuat (Utami, 2020). Selain itu, kesinambungan pendampingan jangka panjang dan akses informasi yang merata ke seluruh lapisan masyarakat menjadi faktor kritis keberhasilan program pemberdayaan. Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga Dalam Peningkatan Ekonomi Keluarga Melalui Program Bunda Puspa”. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peningkatan ekonomi keluarga dari pemberdayaan perempuan dari Program Bunda Puspa.

METODE PELAKSANAAN

Penelitian ini menggunakan metode studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Metode studi kasus kualitatif adalah pendekatan penelitian yang mendalam dan intensif untuk menjelajahi, menganalisis, dan memahami satu atau beberapa kasus dalam konteks kehidupan nyata. Tujuannya adalah untuk mendapatkan pemahaman yang kaya dan holistik tentang fenomena kompleks, alih-alih berfokus pada generalisasi. Data dan informasi yang didapat dengan menggunakan teknik pengumpulan data meliputi observasi, dokumentasi dan wawancara (Sugiyono, 2010). Hasil observasi memungkinkan pengumpulan berbagai data, meliputi aspek spasial dan temporal, individu yang terlibat, aktivitas yang dilakukan, objek yang diamati, tindakan atau kejadian yang terjadi, serta suasana atau perasaan yang ada. Sementara itu, wawancara dilakukan terhadap informan yang telah ditentukan. Metode wawancara yang diterapkan adalah wawancara bebas terpimpin, yang berarti daftar pertanyaan telah disiapkan sebagai panduan awal, namun pewawancara tetap fleksibel untuk mengajukan pertanyaan bervariasi sesuai dengan kondisi aktual selama proses wawancara berlangsung.

Teknik analisis data yang dilakukan yaitu interpretasi data, di mana peneliti menjelaskan makna dari tema-tema yang ditemukan, menghubungkannya dengan kerangka teori, dan membangun narasi yang koheren untuk menjawab pertanyaan penelitian. Proses ini bersifat iteratif, memungkinkan peneliti untuk terus-menerus membandingkan, merevisi, dan menyempurnakan analisisnya hingga tercapai pemahaman yang mendalam dan kaya tentang kasus yang diteliti. Interpretasi pada penelitian ini berdasarkan hasil observasi dan hasil wawancara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 30 Maret 2025. Pengambilan data dilakukan dari perempuan kepala keluarga Bunda Puspa Dinas KBPP PA Kabupaten Gresik. Strategi yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Gresik dalam program Bunda Puspa ini dimulai dengan pertama yaitu pembentukan Tim pelaksana dengan melibatkan Dinas, Perguruan Tinggi, Dunia usaha dan Lembaga Kemasyarakatan yang fokus terhadap perempuan dan anak, langkah kedua yaitu pemetaan perempuan akar rumput di desa penerima manfaat. Langkah ketiga yaitu pembentukan Kelompok Belajar Komunitas. Langkah keempat yaitu penyelenggaraan pembelajaran kelompok belajar komunitas akar rumput sejumlah 6x pertemuan atau 6 modul pembelajaran. Langkah terakhir yaitu pemetaan

perempuan usaha dari antara peserta sekaligus Pemetaan potensi dan pelaksanaan validasi produk. Berikut usaha yang dikembangkan melalui Program Bunda Puspa.

Tabel 1. Usaha yang dikembangkan oleh perempuan kepala keluarga Bunda Puspa Kabupaten Gresik

No	Nama KPM	Usaha Yang Dikembangkan
1	Sri Suhartin	Kue Srawot Pelangi
2	Munawaroh	Penjahit
3	Sri Lestari	Gorengan
4	Aslikhah	Kacang Goreng
5	Luluk Sa'diyah	Pentol

Dari strategi yang dilakukan selama 6x pembelajaran dengan pembelajaran kewirausahaan perempuan khususnya kepala keluarga sangat memberikan kemanfaatan kepada keluarga penerima manfaat dalam rangkai mempertahankan ketahanan keluarga dan kesejahteraan mereka. Secara teknis, strategi pemberdayaan perempuan di Kabupaten Gresik dilaksanakan oleh Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yang berada di bawah Dinas KBPP PA. Bidang ini secara struktural dipimpin oleh Kepala Bidang yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dalam menjalankan fungsi dan strategi tersebut, tidak dapat dihindari bahwa berbagai permasalahan akan dihadapi.



Gambar 1. Dokumentasi Kegiatan Pembelajaran Bunda Puspa

Faktor penghambat pemberdayaan perempuan di kepala keluarga dalam pembelajaran Bunda Puspa ini adalah masih sulitnya mengakses penjualan produk Home Industri mereka di luar kota dikarenakan pembelajaran yang di dapat selama 6 bulan ini masih belum maksimal di materi digital marketing. Apalagi notabenenya perempuan kepala keluarga ini pendidikannya

hanya lulusan SMA. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Ma'rufah (Pendamping Desa Program Bunda Puspa) mengatakan bahwa:

“Sejauh ini program pemberdayaan perempuan yang difasilitasi oleh pemerintah daerah dan dilanjut oleh pemerintah Desa ini sudah berjalan baik tapi eksistensi program yang tersistematis ini yang masih kurang mengingat pendidikan perempuan kepala keluarga Bunda puspa mayoritas adalah SMA dan rata-rata mempunyai tanggungan beberapa anak dan banyak pula kebutuhan yang harus di penuhi belum lagi ada informan yang masih kesulitan memakai media HP di dalam mendukung promosi usahanya, bahkan ada yang belum mempunyai Hp sendiri, jadi diperlukan pembelajaran marketing basis Digital secara intens untuk menghadapi zaman digital, karena penjualan yang laku keras itu melalui penjualan Online. Maka pembelajaran digital marketing, cara packaging serta pengurusan Legalitas produk harus dilakukan pendampingan secara tuntas dan Hal ini yang diharapkan ibu-ibu, apalagi melihat bakat dan minat usaha mereka sudah berjalan baik jadi tinggal pendampingan membangun jaringan agar tidak terjual di lingkup lokal saja, Oleh karena itu pengembangan internal di bidang pemberdayaan perempuan sudah harus diperbaiki terlebih dahulu, pertama, dalam penyusunan program setelah itu sosialisasi pemberdayaan perempuan dilakukan secara merata di seluruh lapisan masyarakat”

Pembahasan

Fenomena ketidakadilan terhadap perempuan merupakan isu global, menyebabkan mereka tertinggal dan terpinggirkan, serta mengalami hambatan dalam berbagai aspek pembangunan. Kondisi ini mencakup ketidakberdayaan dan subordinasi, yang pada gilirannya menghambat kemajuan. Oleh karena itu, pemberdayaan perempuan menjadi krusial, yang diwujudkan melalui peningkatan akses mereka terhadap berbagai sektor pembangunan. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan adanya diskriminasi sosial yang mengakar, di mana perempuan direndahkan dan dianggap sebagai jenis kelamin inferior dibandingkan laki-laki. Akibatnya, perempuan menghadapi banyak rintangan dalam kehidupan mereka, bahkan kesejahteraan dan keselamatan mereka pun terancam. Dalam memperjuangkan hak perempuan baik hak hidup, kesejahteraan dan perlindungan serta pemberdayaan bagi mereka adalah menjadi bahan desakan bagi semua kalangan khususnya lembaga yang peduli terhadap masalah-masalah pemberdayaan seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (NGO), Pattiro dan lembaga Keragaman Agama, maupun akademisi seperti lembaga Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) Universitas Qomaruddin Bungah Gresik. Hakikatnya pemberdayaan terhadap perempuan sudah dilakukan oleh pemerintah daerah di dalam meningkatkan ekonomi Perempuan miskin kepala Keluarga maupun pelaku UMKM sejak Tahun 2023- 2024 yang di kemas di dalam Program Bunda Puspa dan ini sudah berjalan sangat baik dilakukan oleh pemerintah daerah yang bersinergi dengan NGO, civitas akademik dan lembaga keagamaan tingkat Kabupaten. Dalam konteks ini, selaras dengan yang dilakukan pemerintah pusat melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) Republik Indonesia berusaha menyempurnakan tugas pokok, fungsi dan kebijakan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan ekonomi. Hal ini antara lain mencakup peningkatan kapasitas dan kualitas kesetaraan gender dalam kegiatan ekonomi sistem rumah tangga yang umumnya merupakan industri rumahan.

Adapun faktor yang mendukung keberhasilan program ini di antaranya: 1) Komitmen dari Pemerintah Daerah dalam menciptakan lingkungan yang strategis responsif gender, 2) Koordinasi dan sinergi program kebijakan lintas sektoral untuk mendukung penciptaan lingkungan strategis agar memotivasi perempuan untuk terus berusaha dan berpartisipasi di dalam menjalankan program ini agar dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga, 3) dukungan kolaborasi dengan pemerintah desa sangat baik sehingga desa juga mendukung pemenuhan

Copyright (c) 2025 KNOWLEDGE: Jurnal Inovasi Hasil Penelitian dan Pengembangan

kebutuhan operasional untuk mengembangkan kapasitas mereka di dunia usaha, 4) faktor kebersamaan dalam pembentukan suatu kelompok usaha sehingga terwujud partisipasi kerja sama untuk mencapai kepentingan usaha bersama, 5) *capacity building* dan edukasi tentang upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat kepada perempuan kepala keluarga yang dilakukan secara tersistem oleh tim pelaksana Kegiatan yang di SK oleh Bupati Kabupaten Gresik yang mempunyai tugas memberikan pembelajaran dan mendampingi KPM sehingga program, ini berjalan sangat sistematis, 6) kerja sama dengan akademisi yang kompeten di dalam mendampingi perempuan kepala Keluarga di dalam mengembangkan usaha produk unggulan mereka, 7) bantuan alat yang diberikan oleh pemerintah daerah guna mengembangkan usaha mereka sangat bermanfaat bagi pengembangan usaha KPM, 8) membangun *networking* sebagai keterbukaan akses untuk pengembangan hasil usaha yang dikembangkan di dalam pelatihan kewirausahaan.

Untuk menjamin keselarasan dan keseimbangan KPM untuk memperoleh kesempatan usaha diperlukan yang namanya Pemberdayaan dengan melakukan pendekatan yang tepat dan kesesuaian kebutuhan mereka maka diperlukan pendekatan guna mengembangkan peran perempuan kepala keluarga dalam pembangunan. Diperlukan pendekatan kesamaan, anti kemiskinan, efisiensi dan pemberdayaan perempuan. Beberapa upaya pendekatan ini sudah dilakukan dengan tujuan meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan mereka dengan menghapus subordinasi sebagai titik fokus kajian ini dengan melibatkan semua elemen masyarakat, Pemerintah, akademisi dan Tim pelaksana program yang berjalan dengan baik dan sistematis maka faktor pendukung pemberdayaan perempuan kepala keluarga ini berjalan sangat optimal. nilai kemanfaatan dirasakan oleh semua KPM untuk membangun kemandirian, kesejahteraan dan keberlanjutan usaha yang didapat dari pembelajaran di program Bunda Puspa Kabupaten Gresik.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa pemberdayaan perempuan khususnya bagi kepala keluarga menengah ke bawah di kabupaten Gresik. Diperlukan keberlanjutan program Bunda Puspa dengan menambah penyebaran sasaran Desa per kecamatan se Kabupaten Gresik. Priyono dan Pranarka (1996) mendefinisikan pemberdayaan sebagai sebuah proses yang bertujuan untuk membuat masyarakat menjadi mandiri, dengan mendorong individu agar memiliki kapabilitas dalam menentukan arah hidup mereka. Pemberdayaan ini secara khusus harus difokuskan pada kelompok masyarakat yang termarginalkan. Namun, kendalanya adalah masih minimnya dukungan kebijakan, khususnya dalam hal alokasi pembiayaan untuk pemberdayaan perempuan. Minimnya dukungan finansial inilah yang menjadi penghambat utama implementasi pemberdayaan perempuan di berbagai sektor, meskipun kerangka dan instrumen pelaksanaannya sudah tercantum dalam dokumen resmi pemerintah daerah.

Aspek pendukung pelaksanaan program pemberdayaan perempuan kepala keluarga bunda puspa Desa Bungah Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik telah tersedianya industri usaha rumah tangga seperti diuraikan dalam Tabel 1 di atas. Terbentuknya industri rumah tangga perempuan kepala keluarga ini memberi ruang yang cukup besar bagi bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Dinas KBPP PA dalam melakukan pemberdayaan sebab industri-industri rumahan ini dikelola oleh perempuan yang keberadaannya mudah diakses. Di samping adanya usaha rumahan perempuan kepala keluarga ini, aspek pendukung pelaksanaan program pemberdayaan perempuan di Bunda Puspa adalah dapat memanfaatkan sumber daya manusia dan pendampingan dari akademisi yaitu Lembaga Pusat Studi Gender dan Anak Universitas Qomaruddin yang fokus terhadap pemberdayaan Perempuan Dan Anak, Aktivis PATTIRO, Lembaga Keagamaan yang masing-masing tersebut terdapat di daerah ini, dan sebelumnya merupakan modal pendukung yang memadai dalam upaya pemberdayaan perempuan di Desa Bungah Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik.

Faktor pendukung tersedianya industri usaha rumah tangga adalah peran serta KPM yang mengikuti pembelajaran yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah ini dengan baik, dukungan dari semua pihak baik pemerintah daerah maupun NGO, Akademisi dan lembaga keagamaan yang fokus terhadap pemberdayaan perempuan ini adalah faktor utama mendukung terselenggaranya program berjalan dengan baik sedangkan kendala pertama kurang maksimalnya terselenggaranya pemberdayaan perempuan kepala keluarga di desa ini karena masih ada kepala keluarga yang gagap terhadap fasilitas bahkan penerimaan materi digital di dalam mendukung promosi usahanya maka diperlukan pendampingan lanjutan khususnya peningkatan kapasitas kebutuhan pengembangan usaha di bidang digital marketing dan kendala kedua yang dirasakan oleh perempuan kepala keluarga bunda puspa adalah kurangnya modal usaha dalam pengembangan pinjaman maka diperlukan pinjaman lunak dari pemerintah ataupun CSR guna memenuhi kebutuhan dalam rangkai mengembangkan keahlian yang dipelajari pada masa pembelajaran di masa Program Bunda Puspa Tahun ini.

Temuan penelitian ini konsisten dengan studi Nurgina et al. (2023) yang menunjukkan bahwa program PEKKA berkontribusi pada peningkatan ekonomi keluarga melalui peningkatan taraf hidup, pembentukan kesadaran kritis, dan pemenuhan kebutuhan dasar keluarga. Selain itu, hasil penelitian ini juga selaras dengan Yaqini (2021) yang mengungkapkan bahwa DP3AKB bekerja sama dengan Pemerintah Desa Menampu dan penyuluh KUA Gumukmas memberdayakan kelompok PEKKA. Pemberdayaan tersebut dilakukan melalui serangkaian sosialisasi, pembinaan, dan pelatihan intensif, bertujuan untuk membentuk pola pikir dan perilaku yang lebih mandiri, serta mengembangkan potensi anggota PEKKA demi mendukung perubahan positif dalam kehidupan mereka.

KESIMPULAN

Berdasarkan data dan temuan penelitian dalam Strategi Pemberdayaan Perempuan kepala keluarga Bunda Puspa Dinas KBPP PA maka ditarik beberapa kesimpulan pada strategi pemberdayaan perempuan kepala keluarga yang dilakukan oleh pemerintah daerah ini sudah berjalan sangat baik dan memberikan kemanfaatan bagi usaha rumahan KPM Bunda Puspa karena dengan pembelajaran yang sistematis sangat menambah wawasan kewirausahaan bagi pengembangan usaha KPM Bunda Puspa dan respons positif ini dilihat dari data yang diperoleh di lapangan dan hasil wawancara dan pelaksanaan pemberdayaan perempuan ini masih diperlukan keberlanjutan pembelajaran dan pendampingan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. (2006). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta.
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Statistik Gender Indonesia 2024*. Jakarta: Badan Pusat Statistik. <https://www.bps.go.id/id>
- Faizah, N. (2018). Konsep Qiwamah dalam Yurisprudensi Islam. *Al Ahwal*, 11(1). 13-22. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2018.11102>
- Faizah, N. (2023). The Spiritualization of Domestic Violence in the Digital Era: Examining the Cathartic Role of Religious Institutions in Empowering Victims. *De Jure: Jurnal Hukum dan Syaria'iah*, 15(2). 252-267. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v15i2.23297>
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2015). *Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 815. <https://peraturan.bpk.go.id/Download/297640/Permen%20PPPA%20Nomor%206%20Tahun%202015.pdf>

- Khotimah, K. (2009). Diskriminasi gender terhadap perempuan dalam sektor pekerjaan. *Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender Dan Anak*, 4(1), 158-180. <https://ejournal.uinsaizu.ac.id/index.php/yinyang/article/view/226>
- Kurung, N., & Lesang, I. (2023). Strategi Pemberdayaan Perempuan Studi di Dinas Sosial Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2021. *MITITA Jurnal Penelitian*. <https://jurnalmitita.univpasifik.ac.id/index.php/mjp/article/download/8/10/24>
- Marwanti, S., & Astuti, I. D. (2012). Model Pemberdayaan Perempuan Miskin Melalui Pengembangan Kewirausahaan Keluarga Menuju Ekonomi Kreatif Di Kabupaten Karanganyar. *Jurnal Sepa*, 9(1). 134-144. <https://doi.org/10.20961/sepa.v9i1.48814>
- Nurgina, S., Kuswana, D., & Rahmawaty, I. S. (2023). Pemberdayaan Perempuan melalui Perempuan Kepala Keluarga dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga. *Tamkin: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 6(1). <https://doi.org/10.15575/tamkin.v6i1.23943> <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/tamkin/article/view/23943>
- Prijono, O. S., & Pranarka, A. M. (1996). *Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan, dan Implementasi*. CSIS.
- Santi, B. (2004). *Menggalang Perubahan Perlunya Perspektif Gender dalam Otonomi Daerah*. Yayasan Jurnal Perempuan (YJP).
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Sulastri, R., & Ningsih, D. (2020). Pemberdayaan Perempuan Melalui Pelatihan Keterampilan Lokal. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 5(2), 45–58.
- Utami, V. Y. (2020). Dinamika Modal Sosial Dalam Pemberdayaan Masyarakat Pada Desa Wisata Halal Setanggor: Kepercayaan, Jaringan Sosial Dan Norma. *Reformasi*, 10(1), 34-44. <https://core.ac.uk/download/pdf/287209452.pdf>
- Yaqini, N. Y. U., & Agustina, F. R. (2023). Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Di Desa Menampu Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember. *Jurnal Al-Tatwir*, 10(1), 45-56. <https://doi.org/10.35719/altatwir.v10i1.74>